

Nama = Jenny Anisa

NPM = 20120110524

14 September 2021

Dosen = Emilia Susanti, S.H.M.H.

DELIK KHUSUS DI LUAR KUHP

① Bentuk - Bentuk Tindak Pidana ekonomi

② Property crimes

Pbuatan yang mengancam harta benda /kekayaan seseorang atau negara contoh kasusnya adalah Penyalahgunaan Bantuan likuiditas Bank Indonesia bermula dari krisis perekonomian yang ada di Indonesia yang mendorong Bank - Bank umum meminta BI membenarkan Bantuan likuiditas dalam rangka menyelamatkan kembali kondisi likuiditasnya. dan salah satu bank yang diberikan bantuan likuiditas adalah PT Bank Merak Belantung (PT BMB).

PT BMB ini merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh Jenny Anisa selaku direktur utama dan Pandu huana selaku pemegang saham pengendali. PT BMB ini merupakan bank kepercayaan masyarakat hingga pada suatu ketika ada sebuah perusahaan yang bernama PT Adhyaksa yang bergerak di bidang perkebunan sangat meminta dan ingin meminjam dana dari PT BMB. yang seharusnya PT BMB ini tidak memberikan dana pinjaman terhadap PT Adhyaksa dikarenakan PT BMB ini masih dalam tahap pengawasan BPRM, justru memberi pinjaman kepada PT Adhyaksa dengan alasan dan dikecualikan jika PT BMB tidak memberikan pinjaman lagi maka tidak akan dipercaya lagi oleh masyarakat, dan pada akhirnya PT BMB menyakurkan kredit sebesar 8. Triliun rupiah. Namun tak lama kemudian ditemukan sebuah faktor

baru telah terjadi kecacatan prosedur dalam penertbitan surat keterangan lunas terhadap PT BMB dengan tidak dilakukannya Emancip due diligence dan legal due diligence serta ditemukannya transaksi menuntun yang cukup besar oleh Pandu huana selaku Pemegang saham terhadap aset-asetnya. Mengetahui hal tersebut penyidik bertekad untuk menuntaskan kasus tersebut karena diungkap adanya indikasi kerugian keuangan negara yang sangat besar yaitu 20 Triliun Rupiah.

Atas hal tersebut Pandu huana dikenakan dakwaan Subsidiar Kumulatif. Yang kesatu primer dikenakan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang - undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah undang - undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke KUHP. Subsidiar pasal 5 ayat (1) huruf b jo. pasal 18 undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang no. 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. DAN diancam pidana dalam pasal 3 undang - undang No. 8 tahun 2016 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Penyalahgunaan 70. pasal 55 ayat (1) ke-2 jo. pasal 64 KUHP



⑥ Regulatory crime

contoh kasusnya pelanggaran etika bisnis

PT megarsani makmur merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan obat nyamuk masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. Perusahaan ini sudah sangat mengiklan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen. Atas hal tersebut Dwi Putri selaku direktur dikenakan pasal etika bisnis yaitu pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 serta pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 ayat 1)

⑦ Tax crime

contoh kasus penggelapan pajak oleh PT Dwi Mola diduga telah menggelapkan pajak sebesar 10 miliar Rupiah. Dan hasil perhitungan ditemukan pajak yang belum dibayarkan meliputi (PPN), PPh, dan dua pembukuan yang dibuat oleh PT Dwi Mola hanya pembukuan tipe A yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak (SPT) dimana pembukuan penjualan tipe A lebih kecil maka laporan keuangan akan mengisi kekurangan dengan memundahkan uang dari pembukuan tipe B. Pembukuan tipe A dan B ini tidak sesuai dengan prosedur pajak. Atas perbuatan tersebut Pandu Winata selaku penanggung jawab keuangan perusahaan diadukan dengan pasal 59 ayat 1 UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

② analisis terhadap kekhususan dalam tindak pidana ekonomi misalnya didalam perbuatan tindak pidana ekonomi berbeda dengan tindak pidana lainnya, perbedaan tersebut diantaranya adalah adanya perluasan subjek hukum dalam hukum pidana ekonomi, adanya peradilan absentia dan hukum pidana ekonomi percobaan dan membantu pelanggaran dapat dipidana dalam hukum pidana ekonomi. Penafsiran kejahatan dan pelanggaran hukum pidana ekonomi perluasan berlakunya hukum pidana, ketentuan elastis dan mudah berubah hukum pidana ekonomi. Dan beberapa ciri tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana ekonomi merupakan hukum khusus dari tindak pidana dan untuk mengungkap suatu kasus ~~dan~~ harus melalui tahap penyelidikan dan penyidikan yang dibantu oleh kepolisian, tahap penuntutan yang dibantu jaksa penuntut umum, dan memutus perkara sesuai dengan undang-undang yang dibantu oleh majelis hakim.

③ Menurut saya pribadi sudah cukup baik dan efektif mungkin ada beberapa saran saya seperti penyusunan berbagai aturan hukum pidana di bidang ekonomi oleh lembaga legislatif hendaknya memperhatikan prinsip sinkronisasi dan harmonisasi antar berbagai hukum yang ada sehingga penegakan hukum akan lebih mudah dan pasti